

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjunjung Tinggi Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Abelia Desta Mahestina¹, Bunga Diah Ayu Setyaningrum², Dicka Akmal Raharjo³

¹²³ Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email : dickaakmal@student.uns.ac.id

Abstrak: Pendidikan warga negara untuk generasi penerus amat penting untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan nasional serta rasa sayang terhadap tanah air. Pembelajaran ialah hak setiap orang untuk mendapat pendidikan secara sah serta tanpa diskriminasi. Hak Asasi Manusia ialah hak setiap orang tanpa melihat ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, serta kepercayaan. Perlindungan hak asasi manusia dilindungi undang-undang menjaga individu maupun kelompok menjalankan perbuatan melanggar kebebasan dan martabat perseorangan. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan kebebasan dasar manusia. Hal ini karena kebebasan manusia ialah jantung dari prinsip-prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan warga negara ialah bagian integral dari sistem pembelajaran nasional. Oleh sebab itu, pembelajaran adat diintegrasikan ke kurikulum serta pembelajaran disemua jenjang pendidikan. Agar karya dan kiprahnya mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan warga negara diciptakan, dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi dalam sistem pendidikan nasional.

Misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik warga negara khususnya generasi asing agar berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan warga negara sangat penting untuk memperkuat kesadaran akan keamanan nasional dan mempertebal rasa cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan salah satu pilar pembangunan karakter dan identitas masyarakat, artinya pendidikan kewarganegaraan mengajarkan masyarakat. Negara ini menjadi warga negara berbudi pekerti yang baik, warga negara yang cakap dengan menghadapi peristiwa-peristiwa dunia saat berkompetisi. Para pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, diberikan pelatihan kewarganegaraan untuk menanamkan dalam diri mereka nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif tentang pulau tersebut, stabilitas nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemauan demokrasi, hukum dan HAM. dari tantangan yang dihasilkan. dan komunitas dan kepemimpinan komunitas.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam penghormatan HAM di Indonesia. HAM mencakup hak untuk hidup bebas, hak untuk bebas dari perbudakan dan penindasan, kebebasan beropini, hak atas pekerjaan dan pendidikan dan

lain-lain. Setiap orang mempunyai hak tersebut, tanpa diskriminasi terhadap siapapun.

HAM merupakan hak asasi manusia yang mendasar, bersifat global dan tetap. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dan dilestarikan, tidak ada seorang pun yang mengabaikan, mengurangi, atau menghilangkannya. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan contoh HAM dalam kehidupan sipil dan berbangsa. Namun, sejak kemarin hingga saat ini, masih banyak kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaan hak tersebut. Tentu ini tidak lagi menjadi rahasia terbuka. Secara umum, pelanggaran HAM mencakup intoleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain.

Hak seseorang atas kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan salah satu dari sekian banyak contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sipil dan bernegara, namun dari dulu hingga saat ini banyak terjadi kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaan hak tersebut. Tentu saja hal ini bukan lagi menjadi rahasia terbuka. Intoleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang seringkali terjadi. Hal ini bertentangan dengan hukum nasional. 39 Tahun 1999 tentang HAM Republik Indonesia. HAM dipahami juga sebagai suatu sistem hak yang berupa dan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya itulah yang harus dihormati, dilindungi, dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan segala sesuatu yang wajib dihormati dan melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan penting untuk memahami penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Pendekatan kami dalam menulis artikel ini adalah proses penyelidikan menyeluruh. Sedangkan jenis analisisnya adalah jenis analisis yang hasilnya tidak diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau jenis perhitungan lainnya. Upaya untuk memahami dan menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam keadaan tertentu dari perspektif peneliti. Metode kualitatif lebih mengandalkan ciri-ciri fenomenologis yang menekankan pada penghayatan (pemahaman) dan berusaha memahami serta menjelaskan makna tingkah laku seseorang pada keadaan tertentu dari perspektif peneliti. Penelitian kualitatif memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap apa yang sedang diteliti.

2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan pendidikan yang mengedepankan konsep patriotisme, cinta tanah air, dan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang menyediakan lingkungan yang beragam dan beraneka segi berdasarkan kebijakan dari ilmu-ilmu sosial, mata kuliah ini didasarkan pada ilmu politik. Menurut Udin S. Winataputra (2008), karakter multidimensional tersebut berarti bidang studi kewarganegaraan dapat didekati sebagai berikut: pendidikan kewarganegaraan, prinsip dan praktik pendidikan, pendidikan mutu nasional, pendidikan kewarganegaraan, hukum pendidikan dan pembelajaran manusia, seperti. serta pendidikan hukum dan pendidikan demokrasi.

Sebagai J.J. Menurut Cogan, dalam buku Citizen Education (1998), pendidikan warga negara diartikan sebagai pembelajaran formal dan informal yang berlangsung di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media dan lain-lain, yang berkontribusi dalam mendidik seluruh warga negara. Dan menurut David Kerr

dalam bukunya *Citizenship Education: An International Comparison* (1999), pendidikan kewarganegaraan secara umum merupakan suatu proses yang menyiapkan pemuda terhadap peran dan kewajibannya sebagai warga negara.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan warga negara secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang bela negara berdasarkan asas dan asas UUD RI Tahun 1945, komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen untuk menjadi negara kesatuan NKRI. Berdasarkan Nu'man Soemantri (2001: 54), pendidikan warga negara adalah pendidikan yang intinya adalah kerakyatan, yang meluas ke asal pengetahuan lain dan berdampak baik pada pengajaran dan sekolah, masyarakat dan orang tua, semuanya ingin memberikan semangat kepada siswa. memperkuat pemikiran, penelitian, dan praktik demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan warga negara merupakan bagian atau upaya dari tujuan yang sama dengan pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam berbagai bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, sastra negara, khususnya Pancasila dan undang-undang keamanan nasional. Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2003 menerangkan bahwa pendidikan warga negara adalah upaya mempersiapkan murid dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam hubungan warga negara dan negara, serta pelatihan awal untuk membela negara.

Berdasarkan Ahmad Sanusi, Cholisin (2000:1.17) menyatakan bahwa arah utama pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah:

- A. Kehidupan kita diatur oleh hukum.
- B. Kebudayaan negara adalah hukum yang mengatur.
- C. Memperkuat kesadaran masyarakat lewat pendidikan dan reformasi kebijakan.
- D. Mengembangkan warga negara yang berkewajiban.
- E. Pendidikan demokratis.
- F. Peduli terhadap urusan kemasyarakatan.
- G. Sekolah adalah laboratorium demokrasi.
- H. Mengambil keputusan.
- I. Pelatihan manajemen.
- J. Kekuatann demokratis di eksekutif dan legislatif.
- K. Memasarkan interpretasi dan kerja sama global.

4. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

UUD RI Tahun 1945 sebagai undang-undang dasar merupakan kemufakatan warga negara tentang asas dan hukum kehidupan bernegara. Perjanjian ini secara umum mengacu pada kesamaan maksud dan konsep yang tertera pada alinea ke-empat Pembukaan UUD Tahun 1945. Tujuan bernegara bisa diilustrasikan dengan penjelasan "mencerdaskan kehidupan bangsa". Bila dicermati, aktivitas pendidikan suatu negara mengandung keterangan tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa secara keseluruhan. Di dalam negeri, pernyataan ini menyampaikan informasi kepada

penjabat negara dan kepada setiap individu, memberikan kesempatan berpikir, bertindak dan berperilaku dalam proses penyelesaian permasalahan sipil dan sosial serta pengambilan keputusan.

UU nomor 20 tahun 2003 tentang pemanfaatan sistem pendidikan nasional sebagai landasan dan informasi bagi lembaga dan pendidikan warga negara. Ayat 2 Pasal 31 yang mengacu pada tugas dan tujuan negara menyatakan bahwa peranan pendidikan nasional sangat penting dan harus diikuti oleh warga negara untuk mengembangkan karakter peradaban bangsa yang layak dalam kehidupan dan membentuk negara. Intelektual yang bercita-cita membangun bangsa yang berwawasan kebangsaan.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah:

- 1) Melakukan sesuatu yang salah
- 2) Melakukan sesuatu yang merusak nama baik orang lain.
- 3) Mencegah orang mengekspresikan keinginannya dengan cara yang berbeda.
- 4) Kekerasan dengan pemukulan
- 5) Menghapus milik atau hak orang lain.
- 6) Mencegah orang beribadah.

Pelanggaran kebebasan bagi manusia yang berat adalah pelanggaran yang mengakibatkan hancurnya jiwa, raga, harkat dan martabat, peradaban, dan prasarana bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurut undang-undang no. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua kategori: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

1) Genosida

Genosida ialah setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu bangsa, ras, suku dan agama. Contoh kejahatan genosida mencakup pembunuhan anggota, menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang parah pada anggota kelompok perlawanan, dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kehancuran fisik.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis atau berskala besar. Hal ini termasuk tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, perusakan dan perbudakan.

6. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Tragedi Tanjung Priok

Tragedi Tanjung Priok adalah salah satu contoh pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 di kalangan penguasa dan warga di wilayah tersebut. Pemicu kejadian tersebut adalah isu SARA dan unsur politik. Warga memprotes penolakan pemerintah memindahkan makam suci Mbah Priok. Maka dari itu, berujung bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Ratusan korban diperkirakan meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan pasca bentrokan tersebut.

b. Peristiwa Aceh

Hal ini terjadi antara tahun 1990 dan 1998, ketika Daerah Operasi Militer (DOM) dibentuk di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM disebut-sebut disebabkan oleh oknum politik pihak tertentu yang ingin menjadikan Aceh negara merdeka. Penduduk Aceh menjadi sasaran berbagai tindakan kekerasan. Banyak kasus pembunuhan, penculikan dan penyiksaan ditemukan.

7. Penegakan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengangkat lantang dan menjamin perlindungan hak asasi manusia seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen supaya menegakkan serta menjamin hak asasi manusia secara preventif dan represif. Melalui pencegahan dan tindakan, pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalkan dan dihukum secara setimpal. Pemerintah dapat mengambil dua tindakan antara lain:

1) Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan upaya untuk mencegah suatu kejahatan. Beberapa contoh tindakan preventif yang biasa dilakukan oleh penegak hukum:

- a). Edukasi tentang bahaya narkoba.
- b). Nasihat untuk kasus-kasus individual
- c). Rekomendasi dari negara, otoritas atau otoritas
- d). Larangan dan sanksi berdasarkan undang-undang.

2) Upaya Represif

Tindakan represif adalah upaya untuk memperbaiki kekacauan. Berdasarkan Sartono Kartodirdjo, beliau mengelompokkan jenis-jenis penindasan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.

- a) Tindakan pribadi, seperti nasihat dari tokoh masyarakat atau peringatan kepada penjahat
- b) Tindakan kelembagaan, misalnya pengawasan terhadap lembaga atau organisasi.
- c) Dokumen resmi, yaitu dokumen yang mencangkup peraturan resmi yang berlaku.

8. KESIMPULAN

- A. Bidang PKN mencakup berbagai aspek seperti pendidikan politik, nilai-nilai dan Moralitas, karakter bangsa, masyarakat, hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi tema umum di sekolah-

sekolah dan mata kuliah yang memberikan informasi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945.

- B. Tujuan utama pembelajaran kewarga negaraan ialah bertujuan melatih warga negara. Warga negara yang sadar bela negara berdasarkan nilai serta norma UUD RI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika serta komitmen terhadap persatuan NKRI.
- C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah persetujuan umum warga negara terhadap norma-norma dasar dan aturan-aturan dasar kehidupan bernegara. UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Penggunaan Sistem Pendidikan Nasional juga menyoroti pentingnya Pendidikan kewarganegaraan. Ayat (2) Pasal 31 UU tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional mempunyai peranan penting dalam mengembangkan karakter peradaban bangsa yang bermartabat dan membangun visi nasional.
- D. Hak Asasi Manusia
 - 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia:
 - Di Indonesia, pelanggaran HAM diatur dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2000.
 - Pelanggaran HAM ringan meliputi perbuatan-perbuatan seperti perbuatan lewat cara yang salah, merusak nama baik seseorang, menghalangi ekspresi keinginan seseorang, kekerasan fisik, perampasan hak milik dan menghalangi beribadah.
 - 2. Penegakan Hak Asasi Manusia:
 - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga dan menjamin perlindungan HAM.
 - Upaya untuk menghormati hak asasi manusia bersifat preventif (mencegah terjadi pelanggaran) dan menindas (mengoreksi gangguan yang timbul).

REFERENSI

Farhan Nurdiansyah, M., & Anggraeni Dewi, D. (2021). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. In IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies (Vol. 2, Issue 02).

SEMINAR NASIONAL "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global." (n.d.).

2968-Article Text-10308-1-10-20211211. (n.d.).

Prasetyo, S. (n.d.). Volume 2 Number 1 (2023): June E-ISSN: ****-**** Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

(Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, n.d.)

(Pemerintah Kabupaten Mojokerto, n.d.)

(Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, Tujuan, Landasan Hukum, Hingga Goals-Nya - Berita Info Publik, Pendidikan Pelayanan Publik, n.d.)

(Pendidikan Kewarganegaraan_ Nasionalitas, Demokrasi, Integrasi Kebangsaan - Fuad

Noorzeha, S.Fil.I., M.Phil., John Abraham Ziswan Suryosumunar, M.Phi, n.d.)

(Jenis Pelanggaran HAM_ Ringan Dan Berat - Kompas.Com, n.d.)

(Kegiatan Belajar 3 _ Pelanggaran, Pengadilan, Dan Penegakan HAM, n.d.)

(-[https___edeposit.Perpusnas.Go.Id_collection_penegakan-Ham-Sumber
Elektronis_5212](https://e-deposit.perpusnas.go.id/collection/penegakan-ham-sumber-elektronis_5212) - Penelusuran Google, n.d.)